

**RENCANA KERJA (RENJA) AWAL
TAHUN 2020**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH BUMBU**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Bumbu dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2020. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan SKPD yang penting, sarat dengan beban dan tugas yang digantungkan padanya. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2020.

Besar harapan kami bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bisa mewujudkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum di masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 yang pada akhirnya menjadikan Kabupaten Tanah Bumbu menjadi Kabupaten terdepan di Kalimantan. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan atau berpartisipasi hingga tersusunnya Renja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, dan oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan dalam penyusunan Renja kedepannya. Terima kasih.

Batulicin, 01 Juli 2019
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

Ir. H. Riduan
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP . 19630727 199203 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	24
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	25
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	30
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	30
3.3 Program dan Kegiatan	31
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	34
BAB V. PENUTUP	39



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 Perangkat Daerah merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam kerangka teknis penyusunan, Rencana Kerja Perangkat Daerah 2020 mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020, untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2020. Pada dasarnya Rencana Kerja Perangkat Daerah berisi tentang Kebijakan



Umum Perangkat Daerah, dan Program/kegiatan Pembangunan dilingkungan Perangkat Daerah, baik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja -Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra-Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah dengan mengacu pada Rancangan awal RKPD yang disiapkan oleh Bappeda.

Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat analisis dan pengambilan keputusan kedepan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa mendatang. Pada prinsipnya perencanaan kinerja merupakan penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan. Perencanaan merupakan komponen kunci untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pemerintah daerah.

Sedangkan Rencana Kerja membantu pemerintah untuk mencapai tujuan yang sudah diidentifikasi dalam rencana strategik, termasuk didalamnya pembuatan target kinerja dengan menggunakan ukuran-ukuran kinerja.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

- (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;



- (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- (7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- (12) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
- (13) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
- (14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- (16) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025;
- (17) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015;
- (18) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok



dan Susunan Organisasi Lembaga teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

- (19) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- (20) Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.
- (21) Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Bumbu dimaksudkan sebagai telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD 2020, dimana RKPD Tahun 2020 adalah tahun kelima pelaksanaan Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahap III.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Bumbu yaitu :

- 1. Mewujudkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Tanah Bumbu kedalam rencana kegiatan Pembangunan.
- 2. Sebagai arah kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan Program dan Kegiatan Tahunan.



3. Sebagai tolak ukur program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan mencakup latar belakang , landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan
- Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu mencakup Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan,
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Bab V Penutup memuat Catatan penting yang mendapatkan perhatian, Kaidah – Kaidah Pelaksanaan



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Bumbu ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan RENJA Tahunan yang bersangkutan dan APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Program | : Pelayanan Adminitrasi Perkantoran |
| 1.Kegiatan | : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 2.Kegiatan | : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional |
| 3.Kegiatan | : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
| 4.Kegiatan | : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 5.Kegiatan | : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja |
| 6.Kegiatan | : Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 7.Kegiatan | : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| 8. Kegiatan | : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 9. Kegiatan | : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |



-
- | | |
|-------------------|--|
| 10. Kegiatan | : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| 11. Kegiatan | : Penyediaan bahan logistik kantor |
| 12. Kegiatan | : Penyediaan Makanan dan Minuman |
| 13. Kegiatan | : Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah |
| 14. Kegiatan | : Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS |
| 15. Kegiatan | : Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah |
|
 | |
| 2. Program | : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |
| 1. Kegiatan | : Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |
| 2. Kegiatan | : Pengendalian Keamanan Lingkungan |
|
 | |
| 3. Program | : Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal |
| 1. Kegiatan | : Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan |
| 2. Kegiatan | : Pelaksanaan Operasional dan Pengawasan terhadap Pelanggaran PERDA |
| 3. Kegiatan | : Pengawasan dan Penyidikan terhadap pelanggaran PERDA |
|
 | |
| 4. Program | : Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran |
| 1. Kegiatan | : Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran |



- 2.Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
- 3.Kegiatan : Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
- 4.Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
- 5. Program : **Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)**
 - 1.Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Dengan capaian kinerja pada Tahun Anggaran 2019 , Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Bumbu dapat mencapai keberhasilan dalam kinerjanya. Namun kami masih menyadari bahwa dalam hal pelaksanaan kinerja tersebut masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.



Adapun anggaran yang tersedia pada tahun 2019 adalah :

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Target Penyelesaian Pekerjaan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.745.915.419,-	100%
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.600.000,-	12 Bulan
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	169.740.000,-	12 Bulan
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	269.200.000,-	12 bulan
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15.026.300,-	12 bulan
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15.850.000,-	12 Bulan
	- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.198.600,-	12 bulan
	- Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	39.262.500,-	12 bulan
	- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.644.000,-	12 bulan
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	314.725.650,-	12 Bulan
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.140.000,-	12 bulan
	- Penyediaan bahan logistik kantor	35.190.000,-	12 bulan
	- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	27.300.000,-	12 Bulan
	- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	493.800.000,-	12 Bulan



	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 	6.122.138.369,-	12 Bulan
	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dalam daerah 	122.100.000,-	12 Bulan
2.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan 	1.250.051.000,- 84.970.000,- 1.165.081.000,-	100% 10 kec 12 bulan
3.	Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal <ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan - Kegiatan Pelaksanaan Operasional dan Pengawasan terhadap Pelanggaran PERDA - Kegiatan Pengawasan dan Penyidikan terhadap Pelanggaran PERDA 	572.080.000,- 90.410.000,- 233.700.000,- 247.970.000	100% 65 orang 1200 kali 12 kasus
4.	Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran - Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran - Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran - Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 	1.710.421.070,- 77.528.500,- 573.922.570,- 578.760.000,- 480.210.000,-	≤ 15 menit 1 kali 25 unit 57 unit 156 orang



5.	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	46.950.000,-	100%
	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	46.950.000,-	10 kec



**RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

Tabel T-C 29										
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d Tahun 2019 (tahun berjalan)										
Kabupaten Tanah Bumbu										
Kode	Urusan /Bidang Urusan pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program(renstra perangkat daerah) Tahun 2021	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s//d tahun 2017 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2018 (n-2)			Target program dan kegiatan(renja perangkat daerah tahun 2019 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian s/d tahun berjalan target renstra perangkat daerah	
					Target renja perangkat daerah thn 2018 (n-2)	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2018 (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2019 (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
1,05	Ketentraran dan Keteriban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100%	100	100	100%
	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening kantor	72	24	12	12	100%	12	48	67%
	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/opersional yang terpelihara	72	24	12	12	100%	12	48	67%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	72	24	12	12	100%	12	48	67%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	72	24	12	12	100%	12	48	67%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kantor	72	24	12	12	100%	12	48	67%
	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	72	24	12	12	100%	12	48	67%
	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	72	24	12	12	100%	12	48	67%



**RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat Listrik kantor	72	24	12	12	100%	12	48	67%
Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	72	12	12	12	100%	12	36	50%
Kegiatan penyediaan Peralatan rumah Tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	72	-			#DIV/0!	-	-	0%
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan kantor	72	-	12	12	100%	12	24	33%
Kegiatan Penyediaan bahab logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	72	-	12	12	100%	12	24	33%
Kegiatan penyediaan Makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi	72	24	12	12	100%	12	48	67%
Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	72	24	12	12	100%	12	48	67%
Kegiatan penyediaan jasa tenaga Non PNS	Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS	72	24	12	12	100%	12	48	67%
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	72	24	12	12	100%	12	48	67%



**RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100	-	1	1	100%	-	1	1%
Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional	2	-	-	-	#DIV/0!	-	-	0%
Kegiatan Pengadaan Meubeleur	Pengadaan meubeleur kantor	45	-	-	-	#DIV/0!	-	-	0%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang terpelihara	3	-	-	-	#DIV/0!	-	-	0%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	4	-	1	1	100%	-	1	25%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	35	-	-	-	#DIV/0!	-	-	0%
Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	100	-	320	320	100%	-	320	320%
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	1.014	-	320	320	100%	-	320	32%
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	850	-	-	-	#DIV/0!	-	-	0%



**RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	-	-	-	#DIV/0!	-	-	0%
	Pendidikan dan Pelatihan formal	Terlatih dan terdidinya Anggota Satpol PP dan Damkar	60	-	-	-	#DIV/0!	-	-	0%
	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksannya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	36	-	-	-	#DIV/0!	-	-	0%
	Program peningkatan keamanan dan	Menurunnya gangguan kamtrantibmas	36	36	36	36	36	36	36	36
	Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.020	-	-	-	#DIV/0!	-	-	0%
	Pelatihan Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah anggota SATLINMAS yang mengikuti pelatihan	619	50	30	30	100%	50	130	21%
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Pengendalian Keamanan Lingkungan	72	24	12	12	100%	12	48	67%
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	30	-	-	-	#DIV/0!	-	-	0%



**RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Penyelesaian pelanggaran perda	52	20	49	49	49	50	50	96%
	Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Satpol PP	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Satpol PP	315	-	-	-	#DIV/0!	-	-	0%
	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Kerjasama Lintas SKPD, ataupun dengan Instansi Vertikal	36	-	-	-	#DIV/0!	-	-	0%
	kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ Polri dan Kejaksaan	Jumlah kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ Polri dan Kejaksaan	30	-	-	-	#DIV/0!	10	10	33%
	pelaksanaan operasional dan pengawasan terhadap pelanggaran perda	patroli wilayah dan UTS	3.285	200	200	200	100%	695	1.095	33%
	pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda	Kasus dan penertiban	108	10	10	10	100%	16	36	33%
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat	100	-	3	3	100%	3	6	6%
	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah Penyuluhan yang dilaksanakan	10	-	3	3	100%	3	6	60%
	Penyuluhan Pencegahan berkembangnya Praktek Prostitusi	Jumlah Penyuluhan yang dilaksanakan	5	-	-	-	#DIV/0!	-	-	0%
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	36	-	-	-	#DIV/0!	12	12	33%



**RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

Program Peningkatan Keslelapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Kata-rata waktu tanggap respon (respon time)	15	-	15	15	100%	15	15	100%
Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Tersusunnya dokumen	6				#DIV/0!			0%
Penyuluhan norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan	200	-	-	-	#DIV/0!	-	-	0%
Koordinasi peijinan pemantaatan gedung	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	10	-	-	-	#DIV/0!	-	-	0%
Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	Jumlah pemeriksaan dan pengawasan bangunan/ gedung dalam hal alat proteksi kebakaran	40	-	-	-	#DIV/0!	-	-	0%
Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Jumlah anggota yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	148				#DIV/0!			0%
Kegiatan rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran	Jumlah Tenaga yang direkrut menjadi tenaga sukarela	80	-	-	-	#DIV/0!	-	-	0%
Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran	Jumlah Penyuluhan yang dilaksanakan	960	-	-	-	#DIV/0!	-	-	0%
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	1125	-	25	25	100%	300	325	29%
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Terpeliharanya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	60	-	12	12	100%	12	24	100%
Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran yang direhabilitasi	5				#DIV/0!			0%
Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Pelayanan evakuasi akibat kebakaran	700	-	-	-	#DIV/0!	-	-	0%
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran	156		156	156	100%	156	312	200%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen	8				#DIV/0!			0%



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub pol pp dan sub kebakaran) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 33 Tahun 2017 tentang tugas, fungsi, uraian dan tata kerja unsure-unsur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yaitu sebagai berikut :

2.2.1 Tugas

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah :

- a. merumuskan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub pol pp dan sub kebakaran) sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. menetapkan kebijakan teknis dibidangketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub pol pp dan sub kebakaran);
- c. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasandan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang trantibum dan linmas;



- e. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang pemadam kebakaran;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait;
- g. membina dan mengoordinasikan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- h. mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;
- i. mengoordinasikan dan membina unit pelaksanaan teknis;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

2.2.2 Fungsi

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub pol pp dan sub kebakaran);
- b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub pol pp dan sub kebakaran);
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub pol pp dan sub kebakaran);
- d. pelaksanaan administrasi Satpol PP dan Damkar; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



Guna melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Bumbu dalam perumusan kebijakan teknis, harus melaksanakan sesuai dengan lingkup tugasnya. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub pol pp dan sub kebakaran).

Sesuai dengan wewenangnya, pengawasan dilakukan dalam upaya menciptakan kemandirian dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Hal ini dilaksanakan mengingat masih tingginya pelanggaran Peraturan Daerah, baik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, badan hukum maupun masyarakat.

Tabel 2.2 menjelaskan pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.



RENJA SATPOL PP DAN DAMKAR TAHUN 2020



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Komitmen Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Bumbu dalam mengemban tugas dan fungsinya adalah terciptanya kondisi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu yang tertib, aman dan tentram, taat dan patuh terhadap Peraturan perundang-undangan yang demokratis guna terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Guna menyelenggarakan Isu-isu penting kegiatan Perangkat Daerah, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta produk hukum lainnya.
2. Menciptakan ketertiban, kenyamanan dan ketentraman masyarakat.
3. Menurunkan resiko bencana kebakaran di wilayah perumahan dan pemukiman.



2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Bumbu telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan (renstra) Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Bumbu, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Bumbu. Dan dalam dokumen ini juga memuat hasil analisa program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan.



**RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

Tabel Td-11
Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2020
Kabupaten Tanah Bumbu

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran											
No	Rencana awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Luas	Indikator Kinerja	TARGET LUPATAN	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Luas	Indikator Kinerja	TARGET LUPATAN	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Satpol PP dan Damkar	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 9.306.565.793	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Satpol PP dan Damkar	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	9.306.565.793	
1	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Satpol PP dan Damkar	Terbayarnya rekening kantor	12 bulan	Rp. 79.920.000	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Satpol PP dan Damkar	Terbayarnya rekening kantor	12 bulan	79.920.000	
2	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran dinas/operasional	Satpol PP dan Damkar	Jumlah kendaraan dinas yang rusak/berganggu	12 bulan	Rp. 203.668.000	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran dinas/operasional	Satpol PP dan Damkar	Jumlah kendaraan dinas yang rusak/berganggu	12 bulan	203.668.000	
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bulan	Rp. 223.040.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bulan	223.040.000	
4	Kegiatan Penyelenggaraan Kabinet/Kantor	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya alat dan bahan kabinet/kantor	12 bulan	Rp. 10.071.500	Kegiatan Penyelenggaraan Kabinet/Kantor	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya alat dan bahan kabinet/kantor	12 bulan	10.071.500	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Satpol PP dan Damkar	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kantor	12 bulan	Rp. 19.020.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Satpol PP dan Damkar	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kantor	12 bulan	19.020.000	
6	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	Rp. 60.230.320	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	60.230.320	
7	Kegiatan pengelompokan barang cetakan dan pengarsipan	Satpol PP dan Damkar	Cetakan dan Pengarsipan	12 bulan	Rp. 47.115.000	Kegiatan pengelompokan barang cetakan dan pengarsipan	Satpol PP dan Damkar	Cetakan dan Pengarsipan	12 bulan	47.115.000	
8	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya Alet Listrik kantor	12 bulan	Rp. 4.872.300	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya Alet Listrik kantor	12 bulan	4.872.300	
9	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Satpol PP dan Damkar	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Rp. 377.670.000	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Satpol PP dan Damkar	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	377.670.000	
10	Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	Satpol PP dan Damkar	Jumlahnya peralatan rumah tangga	12 bulan	Rp. 12.000.000	Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	Satpol PP dan Damkar	Jumlahnya peralatan rumah tangga	12 bulan	12.000.000	
11	Kegiatan Pengelompokan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya bahan bacaan kantor	12 bulan	Rp. 1.140.000	Kegiatan Pengelompokan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya bahan bacaan kantor	12 bulan	1.140.000	
12	Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	Rp. 12.228.000	Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	12.228.000	
13	Kegiatan penyelenggaraan Monev dan miniman	Satpol PP dan Damkar	Jumlah monev dan miniman untuk apak koordinasi	12 bulan	Rp. 32.760.000	Kegiatan penyelenggaraan Monev dan miniman	Satpol PP dan Damkar	Jumlah monev dan miniman untuk apak koordinasi	12 bulan	32.760.000	
14	Kegiatan rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Satpol PP dan Damkar	Jumlah rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	Rp. 592.560.000	Kegiatan rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Satpol PP dan Damkar	Jumlah rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	592.560.000	
15	Kegiatan penyelenggaraan jasa tenaga Non PNS	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya jasa Tenaga Non PNS	12 bulan	Rp. 7.346.566.043	Kegiatan penyelenggaraan jasa tenaga Non PNS	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya jasa Tenaga Non PNS	12 bulan	7.346.566.043	
16	Kegiatan Rapat/rapat koordinasi dalam daerah	Satpol PP dan Damkar	Jumlah rapat/rapat koordinasi dalam daerah	12 bulan	Rp. 116.520.000	Kegiatan Rapat/rapat koordinasi dalam daerah	Satpol PP dan Damkar	Jumlah rapat/rapat koordinasi dalam daerah	12 bulan	116.520.000	



**RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Satpol PP dan Damkar	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp 2.204.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Satpol PP dan Damkar	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100%	2.204.000.000	
1	Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional	1 unit	Rp 2.000.000.000	Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional	1 unit	2.000.000.000	
2	Kegiatan Pengadaan Meubeleur	Satpol PP dan Damkar	Pengadaan meubeleur kantor	15 unit	Rp 104.000.000	Kegiatan Pengadaan Meubeleur	Satpol PP dan Damkar	Pengadaan meubeleur kantor	15 unit	104.000.000	
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Satpol PP dan Damkar	Gedung kantor yang terpelihara	3 unit	Rp 50.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Satpol PP dan Damkar	Gedung kantor yang terpelihara	3 unit	50.000.000	
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Satpol PP dan Damkar	terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	1 unit	Rp 15.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Satpol PP dan Damkar	terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	1 unit	15.000.000	
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Satpol PP dan Damkar	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	35 unit	Rp 35.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Satpol PP dan Damkar	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	35 unit	35.000.000	
III	Program peningkatan disiplin aparatur	Satpol PP dan Damkar	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	100%	Rp 361.595.000	Program peningkatan disiplin aparatur	Satpol PP dan Damkar	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	100%	361.595.000	
1	Kegiatan Pengadaan Pakain Dinas dan Perlengkapannya	Satpol PP dan Damkar	Jumlah pakain dinas yang tersedia	238 Steli	Rp 266.395.000	Kegiatan Pengadaan Pakain Dinas dan Perlengkapannya	Satpol PP dan Damkar	Jumlah pakain dinas yang tersedia	238 Steli	266.395.000	
2	Kegiatan Pengadaan Pakain Khusus Hari-Hari Tertentu	Satpol PP dan Damkar	Jumlah pakain khusus hari-hari tertentu yang tersedia	238 Steli	Rp 95.200.000	Kegiatan Pengadaan Pakain Khusus Hari-Hari Tertentu	Satpol PP dan Damkar	Jumlah pakain khusus hari-hari tertentu yang tersedia	238 Steli	95.200.000	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Satpol PP dan Damkar	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	Rp 35.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Satpol PP dan Damkar	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	35.000.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan formal	Satpol PP dan Damkar	Terlatih dan terdidinya Anggota Satpol PP dan Damkar	0	0	Pendidikan dan Pelatihan formal	Satpol PP dan Damkar	Terlatih dan terdidinya Anggota Satpol PP dan Damkar	0%	-	
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Satpol PP dan Damkar	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Kasus	Rp 35.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Satpol PP dan Damkar	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Kasus	35.000.000	



**RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

V	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Satpol PP dan Damkar	Menurunnya gangguan kamtibmas	100%	Rp. 5.282.400.000	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Satpol PP dan Damkar	Menurunnya gangguan kamtibmas	100%	5.282.400.000	
1	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Satpol PP dan Damkar	Jumlah tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	1020 CB	Rp. 3.366.000.000	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Satpol PP dan Damkar	Jumlah tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	1020 CB	3.366.000.000	
2	Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Satpol PP dan Damkar	Jumlah anggota SATLINMAS yang mengikuti pelatihan	65 orang	Rp. 332.000.000	Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Satpol PP dan Damkar	Jumlah anggota SATLINMAS yang mengikuti pelatihan	65 orang	332.000.000	
3	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Satpol PP dan Damkar	Pengendalian keamanan lingkungan	12 bulan	Rp. 1.500.000.000	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Satpol PP dan Damkar	Pengendalian keamanan lingkungan	12 bulan	1.500.000.000	
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Satpol PP dan Damkar	Dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	10 dokumen	Rp. 84.400.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Satpol PP dan Damkar	Dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	10 dokumen	84.400.000	
VI	Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Satpol PP dan Damkar	Penyelesaian pelanggaran Perda	100%	Rp. 1.020.394.000	Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Satpol PP dan Damkar	Penyelesaian pelanggaran Perda	100%	1.020.394.000	
1	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Satpol PP dan Damkar	Dokumen pengendalian dan evaluasi kegiatan satpol PP	95 dokumen	Rp. 15.000.000	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Satpol PP dan Damkar	Dokumen pengendalian dan evaluasi kegiatan satpol PP	95 dokumen	15.000.000	
2	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Satpol PP dan Damkar	Jumlah kerjasama lintas SKPD ataupun instansi vertikal	12 kali	Rp. 400.000.000	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Satpol PP dan Damkar	Jumlah kerjasama lintas SKPD ataupun instansi vertikal	12 kali	400.000.000	
3	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	Satpol PP dan Damkar	Jumlah kerjasama kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	10 kali	Rp. 372.894.000	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	Satpol PP dan Damkar	Jumlah kerjasama kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	10 kali	372.894.000	
4	Kegiatan Pelaksanaan Operasional dan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Perda	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Patroli Wilayah dan UTS	1095 patroli wilayah dan UTS	Rp. 172.500.000	Kegiatan Pelaksanaan Operasional dan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Perda	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Patroli Wilayah dan UTS	1095 patroli wilayah dan UTS	172.500.000	
5	Kegiatan Pengawasan dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Perda	Satpol PP dan Damkar	Jumlah penyidikan dan penertiban pelanggaran perda	36 kasus dan penertiban	Rp. 60.000.000	Kegiatan Pengawasan dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Perda	Satpol PP dan Damkar	Jumlah penyidikan dan penertiban pelanggaran perda	36 kasus dan penertiban	60.000.000	



**RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

Satpol PP dan Damkar	Meningkatnya kesadaran masyarakat	100%	Rp 278.360.000	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Satpol PP dan Damkar	Meningkatnya kesadaran masyarakat	100%	278.360.000	
Satpol PP dan Damkar	Jumlah Penyuluhan yang dilaksanakan	2 kec	Rp 136.680.000	Penyuluhan, pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Penyuluhan yang dilaksanakan	2 kec	136.680.000	
Satpol PP dan Damkar	Jumlah Penyuluhan yang dilaksanakan	2 kec	Rp 141.680.000	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Penyuluhan yang dilaksanakan	2 kec	141.680.000	
Satpol PP dan Damkar	Dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	12 laporan	Rp 56.340.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Satpol PP dan Damkar	Dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	12 laporan	56.340.000	
Satpol PP dan Damkar	Rata-rata waktu tanggap (respond time) pemadam kebakaran	≤ 15 menit	3.074.536.000	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Satpol PP dan Damkar	Rata-rata waktu tanggap (respond time) pemadam kebakaran	≤ 15 menit	3.074.536.000	
Satpol PP dan Damkar	Tersusunnya dokumen	2 Dok	25.000.000	Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Satpol PP dan Damkar	Tersusunnya dokumen	2 Dok	25.000.000	
Posko	Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan	100 orang	16.698.000	Penyuluhan norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Posko	Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan	100 orang	16.698.000	
stockholder	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	30 unit	25.000.000	Koordinasi peijinan pemanfaatan gedung	stockholder	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	30 unit	25.000.000	
stockholder	Jumlah pemeriksaan dan pengawasan bangunan/ gedung dalam hal alat proteksi kebakaran	10 unit	15.000.000	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	stockholder	Jumlah pemeriksaan dan pengawasan bangunan/ gedung dalam hal alat proteksi kebakaran	10 unit	15.000.000	



**RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

5	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Kab Tanah Bumbu	Jumlah anggota yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	50 orang	156.000.000	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Kab Tanah Bumbu	Jumlah anggota yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	50 orang	156.000.000	
6	Kegiatan rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran	Kab Tanah Bumbu	Jumlah Tenaga yang direkrut menjadi tenaga sukarela	20 orang	75.000.000	Kegiatan rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran	Kab Tanah Bumbu	Jumlah Tenaga yang direkrut menjadi tenaga sukarela	20 orang	75.000.000	
7	Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Penyuluhan yang dilaksanakan	320 orang	53.760.000	Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Penyuluhan yang dilaksanakan	320 orang	53.760.000	
8	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	300 jeris	1.686.290.400	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	300 jeris	1.686.290.400	
9	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Satpol PP dan Damkar	Terpeliharanya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	12 bulan	845.595.800	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Satpol PP dan Damkar	Terpeliharanya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	12 bulan	845.595.800	
10	Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran yang direhabilitasi	2 unit	300.000.000	Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran yang direhabilitasi	2 unit	300.000.000	
11	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Satpol PP dan Damkar	Pelayanan evakuasi akibat kebakaran	168 kali	50.400.000	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Satpol PP dan Damkar	Pelayanan evakuasi akibat kebakaran	168 kali	50.400.000	
12	Peningkatan pelayanan penanganan penanggulangan bahaya kebakaran	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran	156 orang	480.210.000	Peningkatan pelayanan penanganan penanggulangan bahaya kebakaran	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran	156 orang	480.210.000	
13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Dokumen	2 laporan	15.000.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Dokumen	2 laporan	15.000.000	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah perangkat kerja daerah yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sebagai Perangkat Daerah yang bertugas membantu kepala daerah menegakkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat maka Satuan Polisi Pamong Praja harus mendukung prioritas pembangunan nasional.

Prioritas nasional stabilitas keamanan dan ketertiban merupakan bagian dari prasyarat yang mendukung dimensi pembangunan manusia, sektor unggulan serta pemerataan dan kewilayahan. Lemahnya stabilitas keamanan dan ketertiban akan berdampak pada tidak optimalnya pencapaian target pembangunan.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020, dimaksudkan sebagai acuan dalam menyelesaikan isu-isu penting Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu penegakkan Perda dan Perkada, meningkatkan ketentraman dan ketertiban serta melindungi masyarakat, dan menurunkan resiko bencana kebakaran di wilayah perumahan dan pemukiman Kabupaten Tanah Bumbu.



3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Program pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2020 meliputi :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Penyediaan jasa tenaga Non PNS
- Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- Pengadaan kendaraan dinas operasional
- Pengadaan Meubeleur
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional



-
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 3) Program peningkatan disiplin aparat
- Kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Kegiatan :
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- Kegiatan :
- Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - Pengendalian Keamanan Lingkungan
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 6) Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- Kegiatan :
- Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
 - Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
 - Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan
 - Pelaksanaan Operasional dan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Perda
 - Pengawasan dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Perda



7) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Kegiatan :

- Penyuluhan, pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
- Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan

8) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Kegiatan :

- Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran
- Sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran
- Koordinasi Perijinan Pemanfaatan Gudung
- Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran
- Pendidikan dan Pelatihan pertolongan dan Pencegahan Kebakaran
- Rekrutmen Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
- Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
- Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel T-C 33									
Rumusan rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan masju Tahun 2021									
Nama Perangkat Daerah		: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran							
Kode	Urusan /Bidang Urusan pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan penting	Prakiraan maju rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 05 1 05 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Satpol PP dan Damkar	100%	9.306.869.723	APBD		100%	Rp 11.165.611.667
1 05 1 05 01 01 02	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening kantor	Satpol PP dan Damkar	12 bulan	79.920.000	APBD		12 bulan	Rp 95.904.000
1 05 1 05 01 01 06	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Satpol PP dan Damkar	12 bulan	203.688.000	APBD		12 bulan	Rp 244.425.600
1 05 1 05 01 01 07	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Satpol PP dan Damkar	12 bulan	323.040.000	APBD		12 bulan	Rp 387.648.000
1 05 1 05 01 01 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	Satpol PP dan Damkar	12 bulan	18.031.560	APBD		12 bulan	Rp 21.637.872
1 05 1 05 01 01 09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kantor	Satpol PP dan Damkar	12 bulan	19.020.000	APBD		12 bulan	Rp 22.824.000



**RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

1	05	1	05	01	01	10	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Satpol PP dan Damkar	12 bulan	60.238.320	APBD	12 bulan	Rp	72.285.984
1	05	1	05	01	01	11	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Satpol PP dan Damkar	12 bulan	47.115.000	APBD	12 bulan	Rp	56.538.000
1	05	1	05	01	01	12	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat Listrik kantor	Satpol PP dan Damkar	12 bulan	4.372.800	APBD	12 bulan	Rp	5.247.360
1	05	1	05	01	01	13	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Satpol PP dan Damkar	12 bulan	377.670.000	APBD	12 bulan	Rp	453.200.000
1	05	1	05	01	01	14	Kegiatan penyediaan Peralatan rumah Tangga	Terpenuhiya peralatan rumah tangga	Satpol PP dan Damkar	12 bulan	12.000.000	APBD	12 bulan	Rp	12.000.000
1	05	1	05	01	01	15	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan kantor	Satpol PP dan Damkar	12 bulan	1.140.000	APBD	12 bulan	Rp	1.140.000
1	05	1	05	01	01	16	Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Satpol PP dan Damkar	12 bulan	47.228.000	APBD	12 bulan	Rp	50.673.600
1	05	1	05	01	01	17	Kegiatan penyediaan Makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi	Satpol PP dan Damkar	12 bulan	32.760.000	APBD	12 bulan	Rp	39.312.000
1	05	1	05	01	01	18	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Satpol PP dan Damkar	12 bulan	592.560.000	APBD	12 bulan	Rp	711.072.000
1	05	1	05	01	01	19	Kegiatan penyediaan jasa tenaga Non PNS	Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS	Satpol PP dan Damkar	12 bulan	7.346.566.043	APBD	12 bulan	Rp	8.815.879.251
1	05	1	05	01	01	22	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Satpol PP dan Damkar	12 bulan	146.520.000	APBD	12 bulan	Rp	175.824.000
1	05	1	05	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Satpol PP dan Damkar	100%	Rp 2.204.000.000	APBD	100%	Rp	2.204.000.000
1	05	1	05	01	02	3	Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional	Satpol PP dan Damkar	1 unit	Rp 2.000.000.000	APBD	1 unit	Rp	2.000.000.000
1	05	1	05	01	02	10	Kegiatan Pengadaan Meubeleur	Pengadaan meubeleur kantor	Satpol PP dan Damkar	15 unit	Rp 104.000.000	APBD	15 unit	Rp	104.000.000
1	05	1	05	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang terpelihara	Satpol PP dan Damkar	3 unit	Rp 50.000.000	APBD	3 unit	Rp	50.000.000
1	05	1	05	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	Satpol PP dan Damkar	1 unit	Rp 15.000.000	APBD	1 unit	Rp	15.000.000
1	05	1	05	01	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Satpol PP dan Damkar	35 unit	Rp 35.000.000	APBD	35 unit	Rp	35.000.000



**RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

1	05	1	05	01	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	Satpol PP dan Damkar	100%	Rp 361.595.000	APBD	100%	Rp 361.595.000
1	05	1	05	01	03	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	Satpol PP dan Damkar	238 Stell	Rp 266.395.000	APBD	238 Stell	Rp 266.395.000
1	05	1	05	01	03	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	Satpol PP dan Damkar	238 Stell	Rp 95.200.000	APBD	238 Stell	Rp 95.200.000
1	05	1	05	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Satpol PP dan Damkar	100%	Rp 260.000.000	APBD	100%	Rp 260.000.000
1	05	1	05	05	01	Pendidikan dan Pelatihan formal	Terlatih dan terdidiknya Anggota Satpol PP dan Damkar	Satpol PP dan Damkar	30 orang	Rp 225.000.000	APBD	30 orang	Rp 225.000.000
1	05	1	05	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksannya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Satpol PP dan Damkar	12 Kasus	Rp 35.000.000	APBD	12 Kasus	Rp 35.000.000
											APBD		
1	05	1	05	01	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Menurunnya gangguan kamtrantibmas	Satpol PP dan Damkar	100%	Rp 5.282.400.000	APBD	100%	Rp 6.338.880.000
1	05	1	05	01	15	01	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Satpol PP dan Damkar	1020 OB	Rp 3.366.000.000	APBD	1020 OB	Rp 3.366.000.000
1	05	1	05	01	15	03	Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Satpol PP dan Damkar	65 orang	Rp 332.000.000	APBD	65 orang	Rp 462.300.000
1	05	1	05	01	15	05	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Satpol PP dan Damkar	12 bulan	Rp 1.500.000.000	APBD	12 bulan	Rp 1.500.000.000
1	05	1	05	01	15	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Satpol PP dan Damkar	10 dokumen	Rp 84.400.000	APBD	10 dokumen	Rp 260.050.000



**RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

1	05	1	05	01	16	Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Penyelesaian pelanggaran Perda	Satpol PP dan Damkar	100%	Rp	1.020.394.000	APBD		100%	Rp	1.224.472.800
1	05	1	05	01	16 01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Dokumen pengendalian dan evaluasi kegiatan satpol PP	Satpol PP dan Damkar	95 dokumen	Rp	15.000.000	APBD		110 dokumen	Rp	15.000.000
1	05	1	05	01	16 02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah kerjasama lintas SKPD ataupun instansi vertikal	Satpol PP dan Damkar	12 kali	Rp	400.000.000	APBD		12 kali	Rp	500.000.000
1	05	1	05	01	16 03	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	Jumlah kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	Satpol PP dan Damkar	10 kali	Rp	372.894.000	APBD		10 kali	Rp	372.894.000
1	05	1	05	01	16 07	Kegiatan Pelaksanaan Operasional dan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Perda	Jumlah Patroli Wilayah dan UTS	Satpol PP dan Damkar	1095 patroli wilayah dan UTS	Rp	172.500.000	APBD		1095 patroli wilayah dan UTS	Rp	233.700.000
1	05	1	05	01	16 08	Kegiatan Pengawasan dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Perda	Jumlah penyidikan dan penertiban pelanggaran perda	Satpol PP dan Damkar	36 kasus dan penertiban	Rp	60.000.000	APBD		36 kasus dan penertiban	Rp	247.970.000
1	05	1	05	01	20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Meningkatnya kesadaran masyarakat	Satpol PP dan Damkar	100%	Rp	278.360.000	APBD		100%	Rp	333.936.000
1	05	1	05	01	20 01	Penyuluhan, pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah Penyuluhan yang dilaksanakan	Satpol PP dan Damkar	2 kec	Rp	136.680.000	APBD		2 kec	Rp	136.680.000
1	05	1	05	01	20 02	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	Jumlah Penyuluhan yang dilaksanakan	Satpol PP dan Damkar	2 kec	Rp	141.680.000	APBD		2 kec	Rp	141.680.000
1	05	1	05	01	20	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	Satpol PP dan Damkar	12 laporan	Rp	56.340.000	APBD		12 laporan	Rp	67.608.000



**RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN ANGGARAN 2020**



**RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

1	05	1	05	01	19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rata-rata waktu tanggap (respond time) pemadam kebakaran	Satpol PP dan Damkar	≤ 15 menit	Rp	3.074.536.000	APBD	≤ 15 menit	3.659.443.200		
1	05	1	05	01	10	01	Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Tersusunnya dokumen	Satpol PP dan Damkar	2 Dok	Rp	25.000.000	APBD	2 Dok	Rp	25.000.000
1	05	1	05	01	19	02	Penyuluhan norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan	Proko	100 orang	Rp	16.698.000	APBD	100 orang	Rp	16.698.000
1	05	1	05	01	19	03	Koordinasi pojongan pemantauan gedung	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	stockholder	30 unit	Rp	25.000.000	APBD	40 unit	Rp	25.000.000
1	05	1	05	01	10	04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	Jumlah pemeriksaan dan pengawasan bangunan/ gedung dalam hal alat proteksi kebakaran	stockholder	10 unit	Rp	15.000.000	APBD	10 unit	Rp	15.000.000
1	05	1	05	01	10	05	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Jumlah anggota yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Kab. Tanah Bumbu	50 orang	Rp	150.000.000	APBD	50 orang	Rp	150.000.000
1	05	1	05	01	10	06	Kegiatan rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran	Jumlah Tenaga yang direkrut menjadi tenaga sukarela	Kab. Tanah Bumbu	20 orang	Rp	75.000.000	APBD	20 orang	Rp	75.000.000
1	05	1	05	01	19	07	Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran	Jumlah Penyuluhan yang dilaksanakan	Satpol PP dan Damkar	320 orang	Rp	53.760.000	APBD	320 orang	Rp	53.760.000
1	05	1	05	01	19	08	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Satpol PP dan Damkar	300 jenis	Rp	1.686.290.400	APBD	400 jenis	Rp	2.188.166.400
1	05	1	05	01	19	09	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Terpeliharanya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Satpol PP dan Damkar	12 bulan	Rp	845.596.800	APBD	12 bulan	Rp	845.596.800
1	05	1	05	01	19	10	Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran yang direhabilitasi	Satpol PP dan Damkar	2 unit	Rp	200.000.000	APBD	2 unit	Rp	200.000.000
1	05	1	05	01	19	11	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Pelayanan evakuasi akibat kebakaran	Satpol PP dan Damkar	168 kali	Rp	50.100.000	APBD	168 kali	Rp	50.100.000
1	05	1	05	01	10	12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran	Satpol PP dan Damkar	150 orang	Rp	400.210.000	APBD	150 orang	Rp	400.210.000
1	05	1	05	01	19	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen	Satpol PP dan Damkar	2 laporan	Rp	15.000.000	APBD	2 laporan	Rp	15.000.000



BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan penting yang mendapatkan perhatian

Didalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk Tahun 2020 ini, ada beberapa kegiatan yang anggaran belanjanya ditingkatkan. Hal tersebut dilakukan karena dianggap urgen atau penting sehubungan dengan peningkatan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Didalam pelaksanaan Program dan kegiatan tersebut diatas, dilaksanakan berdasarkan satuan anggaran yang tersedia serta aturan–aturan yang berlaku atau berkenaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Demikian Renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2020 ini dibuat untuk bisa dijadikan sebagai implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penegak peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dari bahaya bencana kebakaran. Atas segala kekurangan dalam



hal penyajian pembuatan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 ini, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Atas saran dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Batulicin, 01 Juli 2019
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran

Ir. H. Riduan
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19630727 199203 1 007